



PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
Tahun 2024-2026

KECAMATAN HATUNGUN
KABUPATEN TAPIN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perubahan Rencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Hatungun ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perubahan Rencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Hatungun pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Hatungun ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya.

Aamiin.

Camat Hatungun,

SLAMET SURYANTO, S.AP, MM
NIP. 13770110 199903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sekarang ini merupakan isu utama dalam pengelolaan administrasi publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat yang direspon pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terukur dan terarah. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional “bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan”. Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka seluruh perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perubahan Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*),

dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tiga tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu tiga tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah dan Perubahan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39).

Maka Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah. Rencana strategis yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan tahunan agar yang dirumuskan efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan yang memuat tujuan, sasaran, program dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin 2024 – 2026, sebagai berikut :

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
- q. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
- r. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- s. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- t. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
 - dd. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- ee. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
- ff. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
- gg. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
- hh. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
- kk. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin. Maka Kecamatan di Kabupaten Tapin memiliki tugas yaitu “Melaksanakan kewenangan pemerintah dalam lingkup tugas umum pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah”
- ll. Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

- mm. Surat Edaran Bupati Tapin 050/413-Randal/Bappelitbang/2022 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2024-2026
- nn. Surat Edaran Bupati Tapin 050/413-Randal/Bappelitbang/2022 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2024-2026
- oo. Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 000.8.3 / 254- Sekrt/Bappelitbang/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Perihal Perubahan Renstra OPD 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin 2024 – 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan, strategi, program dan sasaran yang ingin dicapai dan sebagai acuan melaksanakan Tugas dan Fungsi SKPD yang di emban oleh seluruh aparatur serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik selama 3 (tiga) tahun mendatang dalam rangka mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 3 (tiga) tahun.
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk periode 3 (tiga) tahun.
- 3) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 4) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi

semua *Stake Holders* (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Hatungun.

- 5) Menjadi acuan penyusunan LKjIP Kecamatan Hatungun

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin 2024 – 2026 ini berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan
	2.2 Sumber Daya Kecamatan
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
	3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan
	4.2 Cascading kinerja Kecamatan
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin. Maka Kecamatan di Kabupaten Tapin memiliki tugas yaitu “Melaksanakan kewenangan pemerintah dalam lingkup tugas umum pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah”. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan memiliki fungsi :

- a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas – tugas pemerintah umum;
- c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kementraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
- e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
- f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati;
- c. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan ketenteraman umum dan ketertiban umum;
- e. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, asset dan administrasi kepegawaian.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.b

dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan asset Kecamatan;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat – menyurat dan rumah tangga;
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan,
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas mengelola surat – menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Dan subbagian pada Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Kepala Seksi merupakan pejabat eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun uraian tugas sebagaimana dijabarkan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang dan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji, dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, penyusunan Peraturan Desa, Penataan Desa/Kelurahan, serta penilaian Laporan pertanggung jawaban Kepala Desa;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- j. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba/penilaian Desa/Kelurahan lingkup Kecamatan;

- k. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- o. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- p. Menyiapkan bahan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kecamatan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemerintahan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan Ketertiban Umum. Kepala Seksi merupakan pejabat eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun uraian tugas sebagaimana dijabarkan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisi dan menyajikan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan Bupati, yang meliputi :

1. Menyiapkan bahan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelastarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 2. Menyiapkan bahan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat Kecamatan;
 3. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat Kecamatan;
 4. Menyiapkan bahan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan di tingkat Kecamatan;
 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di tingkat Kecamatan;
 6. Menyiapkan bahan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat Kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
 - e. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lingkup Kecamatan;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan ketentraman dan

ketertiban umum; dan

h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian. Kepala Seksi merupakan pejabat eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun uraian tugas sebagaimana dijabarkan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perekonomian;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kegiatan perekonomian di wilayah Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian Desa dan Kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- e. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi di bidang perekonomian;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan perekonomian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan. Kepala Seksi merupakan pejabat eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun uraian tugas sebagaimana dijabarkan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- c. Mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. Menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan;
- f. Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. Mengoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup;
- h. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembangunan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Kepala Seksi merupakan pejabat eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun uraian tugas sebagaimana dijabarkan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya

- dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - f. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat dan bahan berbahaya lainnya;
 - g. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, dan peranan wanita;
 - h. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak, Pendidikan Dasar, dan penyediaan sarana pendidikan;
 - i. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;
 - j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pembinaan adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - k. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan, dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
 - l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketangakerjaan dan perburuhan;
 - m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan kesejahteraan rakyat;
dan
 - n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

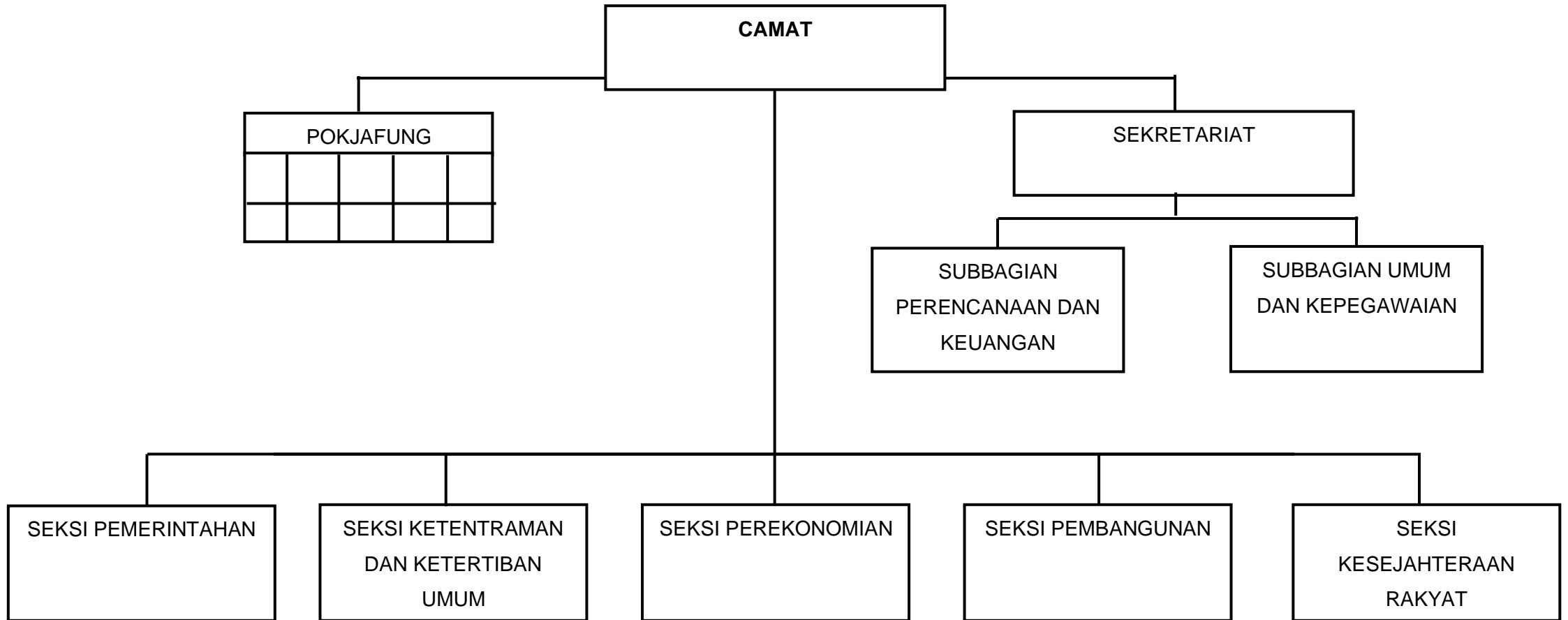
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Camat.

- a. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- b. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset Kelurahan;
- c. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat – menyurat dan rumah tangga;
- d. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan Menyusun laporan kinerja kegiatan kesekretariatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Menurut dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin yang telah dijabarkan sebelumnya. Maka Susunan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tapin sebagai berikut:

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN HATUNGUN



2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1 Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin merupakan akumulasi dari berbagai tingkat pendidikan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, serta golongan ruang dalam rangka menunjang kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Hatungun untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Hatungun Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Serta Pejabat Struktural Dan Fungsional Tahun 2023

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	PANGKAT /GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Strata 2	1	Pembina (IV/a)	1	III.a	1
		1	Penata Tingkat I (III/d)	1	IV.a	1
		1	Penata (III/c)	1	IV.a	1
2.	Strata 1	4	Pembina (IV/a)	1	III.b	1
			Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	IV.b	1
			Penata Muda (III/a)	1	-	1
			Pengatur (II/c)	1	-	1
3.	DIII	2	Penata (III/c)	2	IV.a	2
4.	SLTA	3	Penata Tk. I (III/d)	1	IV.a	1
			Pengatur Muda Tk. I (II/d)	2	-	2
Jumlah		12		12		12

Sumber Data : Kepegawaian Kecamatan Hatungun

Berdasarkan tabel komposisi pegawai Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 3 (tiga) orang. Pegawai yang berpendidikan pendidikan strata 1 (S1) yakni sebanyak 4 (empat) orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan diploma (D3) ada sebanyak 2 (dua) orang, sebanyak 3 (tiga) orang berpendidikan SLTA . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin berpendidikan jenjang S1.

Secara kuantitas, Kecamatan Hatungun masih kekurangan aparatur sipil negara, karena hanya mempunyai 14 (empat belas) ASN. Dari segi Kualitas, Kecamatan dan Kelurahan Hatungun mempunyai SDM kategori baik, hanya saja dengan adanya dinamika peraturan dan perundangan menyebabkan belum semua pegawai menguasai peraturan perundangan. Dengan demikian SDM Kecamatan Hatungun dituntut agar selalu mengembangkan kapasitas diri untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.

2.2.2 Aset

Disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026. Daftar inventaris Barang (sarana dan prasarana) yang dimiliki Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin

Tahun 2023

No	Aset Kecamatan Hatungun	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1
4	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-Lain	1
5	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1
6	Rumah Negara Golongan III Type D Permanen	1
7	Kendaraan Dinas Bermotor:	

No	Aset Kecamatan Hatungun	Jumlah
	a. Mobil	2
	b. Sepeda motor	21
8	PC Unit/ Komputer PC	8
9	Laptop dan NoteBook	14
10	Printer	13
11	Meja Kerja Pejabat :	
	Meja Kerja Pejabat Esellon III	4
	Meja Kerja Pejabat Esellon IV	15
12	Meja Kerja	6
13	Meja Rapat	10
14	Meja Komputer	2
15	Meja Kayu/Rotan	20
16	Meja Receptionsis	1
17	Kursi Kerja Pejabat :	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	6
18	Kursi Hadap Depan Meja Pejabat Eselon IV	6
19	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lainnya	6
20	Kursi Rapat	70
21	Kursi Tamu	4
22	Kursi Lipat	12
23	Kursi Putar	10
24	Kursi Besi/Metal	3
25	Sofa	3

No	Aset Kecamatan Hatungun	Jumlah
26	Filling Besi/Metal	5
27	Lemari Besi/Metal	5
28	Lemari Kaca	1
29	Lemari Kayu	8
30	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1
31	Modem	1
32	Kasur	1
33	Papan Visual	1
34	Papan Tulis	1
35	Papan Pengumuman	6
36	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	2
37	AC Unit	10
38	Kipas Angin	11
39	Televisi	3
40	Stabilisator	1
41	LCD Proyektor	2
42	Mesin Pemotong Rumput	1
43	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	1
44	Camera Video	2
45	Sound System	2
46	Lambang Garuda Pancasila	1
47	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4
48	Transportable Electric Generating Set	2
49	Gordyn	8
50	Handy Talky (HT)	5

No	Aset Kecamatan Hatungun	Jumlah
51	Meubeluer Lainnya	1
52	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
53	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
54	Teralis	2
55	Alat Kantor Lainnya	1
56	Handy Cam	1
57	Karpet	1
58	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	1
59	Alat Studio Lainnya	2
60	Unit Tranceiver VHF Stationary	1
61	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1
62	Peralatan Komputer Lainnya	5
63	CCTV	1
64	Loudspeaker	2
65	Tangga	1
66	UPS	3
67	Genset	1
68	Kamera Digital	1

Sumber Data : Pengurus Barang Kecamatan, 2023

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan yang disusun merupakan

hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*. Sumber daya manusia terkait kinerja untuk mencapai tujuan sasaran harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menjadi masalah besar bagi organisasi terutama penurunan kinerja dan produktivitas kerja.

Kondisi internal dan eksternal Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin sangat mendukung, sehingga memberikan peluang yang cukup baik bagi segenap jajarannya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam dengan baik. Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2022 – 2023. Data untuk mengisi Tabel Kinerja Pelayanan ini diperoleh dari Penetapan Kinerja Kecamatan tahun 2021 dan 2022. Berikut tabel ini menampilkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan dan tabel Anggaran serta Realisasi Pendanaan selama tahun 2022 – 2023.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Hatungun
Pemerintah Kabupaten Tapin

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target Renstra Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87,75 (Poin)		87,92 (Poin)		100,19 %	
2.	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %		100 %		100 %	
3.	Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	100 %		100 %		100 %	
4.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 %		100 %		100 %	
5.	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa yang Baik	100 %		100 %		100 %	
6.	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100 %		100 %		100 %	
PERUBAHAN							
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam		88 (Poin)		88,29 (Poin)		100,3%

	Pelayanan						
2.	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		100 %		100 %		100 %
3.	Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan		100 %		100 %		100 %
4.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan		100 %		100 %		100 %
5.	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik		100 %		100 %		100 %
6.	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset Desa yang Baik		100 %		100 %		100 %
7.	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik		100 %		100 %		100 %
8.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		72,59%		72,65%		100,08%
9.	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah		42,6 Poin		46,5 Poin		109,15%

Sumber Data : LKjIP Kecamatan Hatungun 2021 – 2022

Tabel 2. 4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Hatungun
Pemerintah Kabupaten Tapin

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Belanja Pegawai	1.799.874.269	1.801.986.153	1.641.688.901	1.702.733.727	91,21	94,49
Belanja Barang dan Jasa	1.113.955.900	2.099.110.692	1.100.998.656	1.676.523.072	98,84	98,84
Belanja Modal	97.528.900	835.076.384	97.300.000	530.990.000	99,77	63,58
Total	3.011.359.069	4.736.173.229	2.839.987.557	3.910.246.799	94,31	82,56

Sumber Data : SIMDA 2022 dan FMIS 2023

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan serta tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Hatungun selama tahun 2022 - 2023 dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Hatungun secara umum sudah cukup memuaskan. Penyerapan anggaran juga dapat dikatakan baik karena total realisasi anggaran lebih dari

80% dan tidak ada yang melebihi anggarannya. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:

1. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan Hatungun;
2. Optimalisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan ekonomi keluarga;
4. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait usulan masyarakat ;
5. Peningkatan pelaksanaan komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ/STQ;
7. Peningkatan anggaran operasional, sarana mobilitas, dan sarana pendukung pekerjaan;
8. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan.

Dari hasil tersebut dapat diketahui potensi dan permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Hatungun. Adapun potensi Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. SDM yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja;
2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas;
3. Perkembangan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat ;

4. Peningkatan anggaran operasional dan sarana pendukung pekerjaan;
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan ekonomi keluarga;
6. Peningkatan hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat
7. Komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk semakin meningkat;
8. Partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ/STQ semakin meningkat;
9. Pemahaman masyarakat yang meningkat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan .

Sementara itu, permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditambahkan SDM pelayanan yang berkualitas;
2. Perlu ditingkatkannya ketepatan penempatan personal;
3. Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi;
4. Perlu dikembangkan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
5. Perlu ditingkatkan anggaran operasional dan sarana pendukung pekerjaan;
6. Perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan ekonomi keluarga;
7. Perlu ditingkatkan hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat;
8. Perlu ditingkatkan komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk;

9. Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ/STQ ;
10. Perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan ;
11. Perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala.

Potensi dan permasalahan ini menjadi acuan dalam peningkatan kinerja Kecamatan Hatungun untuk periode selanjutnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Hatungun antara lain:

1. Tingkat kesiapan SDM dan sistem dalam menciptakan pelayanan prima;
2. Ketepatan penempatan personil, kesesuaian tugas pokok dan fungsi organisasi terhadap kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Hatungun
3. Sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Hatungun serta ketersediaan anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Hatungun;
4. Komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk ;
5. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait usulan masyarakat;
6. Pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan;
7. Komitmen dan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa/kelurahan, keterlibatan dalam peserta MTQ/STQ dan usulan pembangunan di desa;
8. Koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin berkomitmen dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung kinerja utama pemerintah daerah kabupaten tapin dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber dayanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat, sehingga selalu serasi, sinkron dan berkolaborasi.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang dalam pelayanan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, yakni sebagai berikut:

1. Tantangan :

- a. Masih kurangnya SDM pelayanan yang berkualitas;
- b. Masih kurang tepatnya penempatan personil sesuai kompetensinya;
- c. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Masih belum berkembangnya teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- e. Masih minimnya anggaran operasional dan sarana pendukung pekerjaan;
- f. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan ekonomi keluarga;
- g. Masih belum optimalnya hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat;
- h. Masih belum optimalnya komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk ;
- i. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ/STQ ;
- j. Perlu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan ;
- k. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi kinerja pegawai;

I. Good governance sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan.

2. Peluang

Beberapa peluang yang dimiliki Kecamatan Hatungun dalam melaksanakan tugas dan fungsi diharapkan kedepan dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan organisasi, peluang-peluang tersebut antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menempatkan Kecamatan Hatungun sebagai institusi dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, dimana kecamatan berperan dalam sistem pelayanan terpadu, dimana dengan sistem pelayanan terpadu tersebut bertujuan di antaranya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ; memperpendek proses pelayanan ; serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ;
- c. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana peran kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap desa ;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa peraturan turunannya memberi peluang bagi Kecamatan Hatungun untuk menjalankan peran dalam mendukung proses pembangunan daerah ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan , dimana tugas dan fungsi kecamatan diantaranya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di kecamatan, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat , mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum , mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah , mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum , mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan , membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa , melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan ;

- f. Adanya kebijakan pemerintah menerapkan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD_RI) di seluruh Indonesia, Kecamatan Hatungun yang berperan dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi di desa;
- g. Kecamatan Hatungun memiliki jumlah penduduk yang cukup besar serta memiliki UMKM-UMKM yang banyak, dan jika dapat diberdayakan merupakan potensi sumber daya pembangunan yang cukup besar;
- h. Tersedianya pendidikan formal negeri dan swasta taraf Diploma, S1 dan S2 sehingga membuka kesempatan bagi peningkatan pendidikan formal aparatur Kecamatan melalui izin ataupun tugas belajar;
- i. Pelaksanaan studi banding dan proses pembelajaran keluar daerah juga dapat membuka wawasan pemikiran dan meningkatkan kualitas aparatur Kecamatan.

Semua potensi yang dimiliki harus dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa aktifitas bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dan rangka berkontribusi pada pencapaian kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Tapin.

Untuk menghadapi tantangan dan menyelenggaraan pelayanan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan pendanaan untuk periode 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel Perkiraan Anggaran Belanja Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin 2024-2026 di bawah ini.

Tabel 2. 5
Perkiraan Anggaran Belanja Kecamatan Hatungun 2024 – 2026

Tahun	2024	2025	2026
Anggaran	3.529.522.157	3.917.769.595	4.309.546.554

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan – permasalahan pelayanan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurang terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pelayanan yang ada di kecamatan.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses pelayanan antara Kecamatan dan Desa.
3. Belum optimalnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
5. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu.
6. Belum terpenuhinya formasi aparatur Kecamatan sesuai dengan struktur perangkat daerah.
7. Masih kurangnya disiplin dan etos kerja
8. Belum optimalnya Kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk.

Faktor – faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut dapat dibagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor terkait kewenangan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin. Sedangkan Faktor eksternal merupakan faktor yang di luar kewenangan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin. Berikut akan dijabarkan faktor – faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin :

- 1) Faktor Internal
 - a. Tingkat pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan
 - b. Kuantitas dan kualitas SDM

- c. Pembinaan internal secara berkesinambungan
- d. Program pengadaan sarana prasarana dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana
- e. Ketersediaan SOP yang jelas untuk proses pelayanan di Kecamatan
- f. Kemampuan dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran
- g. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

2) Faktor Eksternal

- a. Kebijakan kepala daerah atau pemerintah yang lebih tinggi terkait proses pelayanan di Kecamatan,
- b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan
- c. Keterlibatan pihak eksternal dalam peningkatan kualitas SDM Kecamatan.
- d. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan,
- e. Keterlibatan pihak eksternal dalam proses pelayanan Kecamatan. Misal BPS sebagai salah satu sumber data dan informasi untuk menyusun Laporan Kecamatan

3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama 3 (tiga) tahun kedepan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu :

- 1) Implementasi Pelayanan Prima;
- 2) Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa;
- 3) Peningkatan Pembinaan Masyarakat Desa dalam rangka Peningkatan Peran

Serta Masyarakat untuk Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa;

4) Mengumpulkan usulan pada pra Musrenbang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 3 (tiga) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kecamatan Hatungun untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin adalah ***Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*** kemudian mengalami perubahan menjadi ***Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah***.

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Untuk mendukung perwujudan tujuan organisasi, maka Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin menetapkan Tujuan dan Sasaran strategis sebagai berikut:

1. *Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan*

- a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
- b) Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.

2. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*

- a) Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Kemudian Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut mengalami Perubahan

yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan
 - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
 - b. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
3. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah
 - a. Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN

4.2 Cascading Kecamatan Hatungun

Adapun perubahan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Hatungun beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
KECAMATAN HATUNGUN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
				PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87,75	88	88,05	88,10	88,15
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100	100	100	100	100
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100	100	100	100	100
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sesuai ketentuan	100	100	100	100	100

			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	72,59	72,68	72,79	72,89
		Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	-	24,58	24,59	24,61	24,63
			Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	-	19,10	19,14	19,18	19,20
			Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	-	10,36	10,38	10,41	10,45
			Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	-	18,55	18,57	18,59	18,61
PERUBAHAN								
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87,75	88	88,05	88,10	88,15
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan Indeks Minimal B	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai	-	100	100	100	100

			ketentuan					
			Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	-	100	100	100	100
			Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	-	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	72,65	72,68	72,79	72,89
		Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)		24,60	24,59	24,61	24,63
			Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)		22,50	19,14	19,18	19,20
			Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)		10,05	10,38	10,41	10,45
			Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)		15,50	18,57	18,59	18,61
3.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah		46,5	44,4	45	48

	Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%		100	100	100	100
--	--------	-----------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Hatungun 2024- 2026 dan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada RPD 2024-2026.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Hatungun sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH
KECAMATAN HATUNGUN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Implementasi Pelayanan Prima	Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Sumber Daya Aparatur di bidang Pelayanan
			Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Aparatur Desa
		Peningkatan Pembinaan Masyarakat Desa dalam rangka Peningkatan Peran Serta Masyarakat untuk Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Perekonomian Masyarakat Desa
		Mengumpulkan usulan pada pra Musrenbang	Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Instrumen Yang Lebih Baik Untuk Memandu Kebutuhan, Perumusan Stakeholders dan Meningkatkan Realisasi Usulan Musrenbang Desa
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Memerlukan komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai dengan staf pelaksana di organisasi perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKIP

PERUBAHAN				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Implementasi Pelayanan Prima	Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Sumber Daya Aparatur di Bidang Pelayanan	
			Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	
	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Aparatur Desa/Kelurahan	
			Peningkatan Pembinaan Masyarakat Desa dalam rangka Peningkatan Peran Serta Masyarakat untuk Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa/Kelurahan	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Perekonomian Masyarakat Desa/Kelurahan
			Mengumpulkan Usulan Pada Pra Musrenbang	Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Instrumen Yang Lebih Baik Untuk Memandu Kebutuhan, Perumusan Stakeholders dan Meningkatkan Realisasi Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran	
			Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran	
			Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah	

		Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
			Meningkatkan evaluasi capaian kinerja secara berkesinambungan
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Meningkatkan Kompetensi ASN Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Pendidikan Kilat (DIKLAT) ASN Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Perubahan Renstra Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin 2024-2026, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kantor Kecamatan Hatungun dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikatif dan lokasi selama 3 (tiga) tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen Renstra PD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kantor Kecamatan Hatungun dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Hatungun
Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan															
Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Kecamatan															
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	136.000.000	100	145.000.000	100	154.000.000	100	435.000.000	CAMAT	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan Hatungun (Dengan Satuan:%)	100	100	128.000.000	100	135.000.000	100	142.000.000	100	405.000.000	KASI PEMBANGUNAN	
			Persentase laporan pada Seksi Pembangunan Kec. Hatungun (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		KASI PEMBANGUNAN					
			Persentase Pelayanan Administrasi Kegiatan Keagamaan pada Seksi Kesejahteraan Rakyat Kec. Hatungun yang ditindaklanjuti. (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		KASI KESRA					
			Persentase keluhan/pengaduan masyarakat pada seksi Kesejahteraan Rakyat Kec. Hatungun yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		KASI KESRA					
			Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat di Kec. Hatungun yang disalurkan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		KASI KESRA					
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	8	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMBANGUNAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEMBANGUNAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	120.000.000	2	125.000.000	2	130.000.000	2	375.000.000	KASI KESRA	,Kecamatan Hatungun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha yang dikeluarkan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	30.000.000	KASI PEREKONOMIAN	
				Persentase keluhan/pengaduan masyarakat Hatungun pada seksi perekonomian yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEREKONOMIAN	
				Persentase laporan pada Seksi Perekonomian Kec. Hatungun (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEREKONOMIAN	
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEREKONOMIAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEREKONOMIAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	30.000.000	CAMAT	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan pada Seksi Trantib Kec. Hatungun (Dengan Satuan:%)	100	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	30.000.000	KASI TRANTIB	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	39.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	135.000.000	CAMAT	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat Hatungun pada Seksi Trantib yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	39.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	135.000.000	KASI TRANTIB	
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	0	300	35.000.000	300	40.000.000	300	45.000.000	300	120.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Dengan Satuan:Orang)	0	60	4.000.000	60	5.000.000	60	6.000.000	60	15.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa															
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	135.000.000	CAMAT	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Kependudukan Desa/Kelurahan di Kecamatan Hatungun (Dengan Satuan:Laporan)	96	96	40.000.000	96	45.000.000	96	50.000.000	96	135.000.000	KASI PEMERINTAHAN	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	135.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	53.000.000	100	65.000.000	100	77.000.000	100	195.000.000	CAMAT	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) (Dengan Satuan:Dokumen)	32	32	53.000.000	32	65.000.000	32	77.000.000	32	195.000.000	KASI PEMERINTAHAN	
				Jumlah dokumen terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa se-Kecamatan Hatungun (Dengan Satuan:Dokumen)	56	56		56		56		56		KASI PEMERINTAHAN	
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	16	16	4.000.000	16	5.000.000	16	6.000.000	16	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	16	16	4.000.000	16	5.000.000	16	6.000.000	16	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Hatungun
		7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	90.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah															
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)															
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat . (Dengan Satuan:%)	100	100	3.253.522.157	100	3.607.769.595	100	3.965.546.554	100	10.826.838.306	SEKRETARIS KECAMATAN	
				Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN	
				Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu. (Dengan Satuan:%)	100	100	21.000.000	100	28.000.000	100	35.000.000	100	84.000.000	KASUBAG RENKEU	
				Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
				Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	13	10	15.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	60.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti. (Dengan Satuan:%)	100	100	1.940.522.157	100	2.149.769.595	100	2.337.546.554	100	6.427.838.306	KASUBAG RENKEU	
				Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
				Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang / bulan)	13	13	1.933.022.157	13	2.140.769.595	13	2.327.046.554	13	6.400.838.306	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	40	2.500.000	40	3.000.000	40	3.500.000	40	9.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	9.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	9.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	61,78	80	10.000.000	80	15.000.000	80	20.000.000	80	45.000.000	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	2.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	9.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	8	8.000.000	8	12.000.000	8	16.000.000	8	36.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat Kec. Hatungun (Dengan Satuan:Poin)	78	78	596.000.000	79	629.000.000	80	676.000.000	80	1.901.000.000	KASUBAG UMPEG	
				Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN (Dengan Satuan:%)	1	2		2		2		2		KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	51.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	32.000.000	1	34.000.000	1	36.000.000	1	102.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	55.000.000	1	56.000.000	1	57.000.000	1	168.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	42.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	5.000.000	12	8.000.000	12	10.000.000	12	23.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	475.000.000	12	500.000.000	12	540.000.000	12	1.515.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	61,78	80	205.000.000	80	230.000.000	80	255.000.000	80	690.000.000	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	14	5	125.000.000	7	130.000.000	10	135.000.000	10	390.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	3	50.000.000	6	60.000.000	8	70.000.000	8	180.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	2	30.000.000	3	40.000.000	5	50.000.000	5	120.000.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	61,78	80	95.000.000	80	106.000.000	80	117.000.000	80	318.000.000	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	18.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	105.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	195.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	61,78	80	386.000.000	80	450.000.000	80	525.000.000	80	1.361.000.000	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	4	4	70.000.000	4	80.000.000	4	100.000.000	4	250.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	22	25	16.000.000	25	20.000.000	25	25.000.000	25	61.000.000	KASUBAG UMPEG	, Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	1.050.000.000	KASUBAG UMPEG	, Kecamatan Hatungun
TOTAL:							3.529.522.157		3.917.769.595		4.309.546.554		14.908.197.375		

PERUBAHAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan															
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	136.000.000	100	145.000.000	100	154.000.000	100	435.000.000	CAMAT	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang terbitkan (Dengan Satuan:%)	0	100	128.000.000	100	135.000.000	100	142.000.000	100	405.000.000	KASI PEMBANGUNAN	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (seksi pembangunan) (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASI PEMBANGUNAN	
				Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI KESRA	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (seksi kesra) (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASI KESRA	
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	8	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMBANGUNAN	, Kecamatan Hatungun
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEMBANGUNAN	, Kecamatan Hatungun
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	120.000.000	2	125.000.000	2	130.000.000	2	375.000.000	KASI KESRA	, Kecamatan Hatungun

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Tingkat	Persentase Surat Rekomendasi Keterangan Usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (Dengan Satuan:%)	100	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	30.000.000	KASI PEREKONOMIAN	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASI PEREKONOMIAN	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEREKONOMIAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEREKONOMIAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	30.000.000	CAMAT	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi Trantibum yang diterbitkan Kec. Hatungun (Dengan Satuan:%)	0	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	30.000.000	KASI TRANTIB	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	100	100									
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	39.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	135.000.000	CAMAT	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Trantibum yang diterbitkan Kec. Hatungun (Dengan Satuan:%)	0	100	39.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	135.000.000	KASI TRANTIB	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASI TRANTIB	
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	300	300	35.000.000	300	40.000.000	300	45.000.000	300	120.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Dengan Satuan:Orang)	50	60	4.000.000	60	5.000.000	60	6.000.000	60	15.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa														

	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Hatungun)(Dengan Satuan:%)	100	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	135.000.000	CAMAT	
			Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100			
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu (Dengan Satuan:Laporan)	100	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	135.000.000	KASI PEMERINTAHAN	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100			
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	135.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	53.000.000	100	65.000.000	100	77.000.000	100	195.000.000	CAMAT	
			Persentase Desa dengan pengelolaan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	87	80		80		80		80		CAMAT	
			Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		CAMAT	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (Dengan Satuan:%)	100	100	53.000.000	100	65.000.000	100	77.000.000	100	195.000.000	KASI PEMERINTAHAN	
			Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi) (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEMERINTAHAN	
			Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEMERINTAHAN	
			Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik (Dengan Satuan:%)	87	80		80		80		80		KASI PEMERINTAHAN	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEMERINTAHAN	
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa(Dengan Satuan:Dokumen)	16	16	4.000.000	16	5.000.000	16	6.000.000	16	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	16	16	4.000.000	16	5.000.000	16	6.000.000	16	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun

	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Hatungun
	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa diWilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	90.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah														
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah														
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan. (Dengan Satuan:Poin)	88,05	88,10	3.253.522.157	88,15	3.607.769.595	88,20	3.965.546.554	88,25	10.826.838.306	CAMAT	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Score)	72,65	72,68		72,79		72,89		72,89		CAMAT	
			Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Poin)	46,5	44,4		45		48		48		CAMAT	
			Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	24,58	24,59		24,61		24,63		24,63		SEKRETARIS KECAMATAN	
			(Pengukuran Kinerja)	19,10	19,14		19,18		19,20		19,20			
			(Pelaporan Kinerja)	10,36	10,38		10,41		10,45		10,45			
			(Evaluasi Internal) (Dengan Satuan:Score)	18,55	18,57		18,59		18,61		18,61			
			Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN	
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:poin)	72,44	70,58		70,83		70,90		70,90		SEKRETARIS KECAMATAN	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti. (Dengan Satuan:%)	100	100	21.000.000	100	28.000.000	100	35.000.000	100	84.000.000	KASUBAG RENKEU	
			Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
			Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Hatungun

7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	15	10	15.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	60.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dengan Satuan:%)	100	100	1.940.522.157	100	2.149.769.595	100	2.337.546.554	100	6.427.838.306	KASUBAG RENKEU	
		Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		KASUBAG RENKEU			
		Persentase aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		KASUBAG RENKEU			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang / bulan)	13	13	1.933.022.157	13	2.140.769.595	13	2.327.046.554	13	6.400.838.306	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	40	2.500.000	40	3.000.000	40	3.500.000	40	9.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	9.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	9.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	69,31	80	10.000.000	80	15.000.000	80	20.000.000	80	45.000.000	KASUBAG UMPEG	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	2.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	9.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	8	8.000.000	8	12.000.000	8	16.000.000	8	36.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	7,69	7,69	596.000.000	7,69	629.000.000	7,69	676.000.000	7,69	1.901.000.000	KASUBAG UMPEG	
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		KASUBAG UMPEG			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	51.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	32.000.000	1	34.000.000	1	36.000.000	1	102.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Dengan Satuan:Paket)	1	1	55.000.000	1	56.000.000	1	57.000.000	1	168.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	42.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	5.000.000	12	8.000.000	12	10.000.000	12	23.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	475.000.000	12	500.000.000	12	540.000.000	12	1.515.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	69,31	80	205.000.000	80	230.000.000	80	255.000.000	80	690.000.000	KASUBAG UMPEG	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	91	5	125.000.000	7	130.000.000	10	135.000.000	10	390.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	3	50.000.000	6	60.000.000	8	70.000.000	8	180.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	2	30.000.000	3	40.000.000	5	50.000.000	5	120.000.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	100	95.000.000	100	106.000.000	100	117.000.000	100	318.000.000	KASUBAG UMPEG	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	18.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	105.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	195.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	69,31	80	386.000.000	80	450.000.000	80	525.000.000	80	1.361.000.000	KASUBAG UMPEG	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Dengan Satuan:Unit)	4	4	70.000.000	4	80.000.000	4	100.000.000	4	250.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	22	25	16.000.000	25	20.000.000	25	25.000.000	25	61.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	1.050.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
TOTAL:					3.529.522.157	3.917.769.595		4.309.546.554		14.908.197.375			

Tabel 6.2

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	KECAMATAN HATUNGUN				3.529.522.157		3.917.769.595		4.309.546.554		14.908.197.375	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.529.522.157		3.917.769.595		4.309.546.554		14.908.197.375	
7.01	KECAMATAN				3.529.522.157		3.917.769.595		4.309.546.554		14.908.197.375	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat . (Dengan Satuan:%)	100	100	3.253.522.157	100	3.607.769.595	100	3.965.546.554	100	13.732.644.311	Kecamatan Hatungun
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Hatungun
		Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kecamatan Hatungun
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	171.233.280	Kecamatan Hatungun
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	136.000.000	100	145.000.000	100	154.000.000	100	565.080.423	Kecamatan Hatungun
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	37.000.666	Kecamatan Hatungun
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	39.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	168.500.630	Kecamatan Hatungun
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	53.000.000	100	65.000.000	100	77.000.000	100	233.738.065	Kecamatan Hatungun
		TOTAL:			3.529.522.157		3.917.769.595		4.309.546.554		14.908.197.375	

Tabel 6.3
Perubahan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
KebutuhanPendanaan Kecamatan Hatungun
Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	KECAMATAN HATUNGUN				3.529.522.157		3.917.769.595		4.309.546.554		14.908.197.375	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.529.522.157		3.917.769.595		4.309.546.554		14.908.197.375	
7.01	KECAMATAN				3.529.522.157		3.917.769.595		4.309.546.554		14.908.197.375	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	100	100	3.253.522.157	100	3.607.769.595	100	3.965.546.554	100	13.732.644.311	Kecamatan Hatungun
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	24,60	24,59		24,61		24,63		24,63		
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	22,50	19,14		19,18		19,20		19,20		
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	10,05	10,38		10,41		10,45		10,45		
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	15,50	18,57		18,59		18,61		18,61		
		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	46,5	44,5		45		48		48		
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100	100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72,44	70,58		70,83		70,90		70,90		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	171.233.280	Kecamatan Hatungun
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100	100		100		100		100		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100	100	136.000.000	100	145.000.000	100	154.000.000	100	565.080.423	Kecamatan Hatungun
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	37.000.666	Kecamatan Hatungun
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100	100	39.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	168.500.630	Kecamatan Hatungun
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100	100	53.000.000	100	65.000.000	100	77.000.000	100	233.738.065	Kecamatan Hatungun
		Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		

		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		
			TOTAL:		3.529.522.157		3.917.769.595		4.309.546.554		14.908.197.375	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2024-2026, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Kecamatan Hatungun yang ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:

Indikator Kinerja Kecamatan Hatungun yang termuat dalam Bab VII Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPD Kabupaten Tapin 2024-2026.

Indikator kinerja sasaran (impact) Renstra Kecamatan Hatungun pada Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Indikator kinerja program (outcome) Renstra Kecamatan Hatungun pada Bab VI rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dengan demikian, indikator kinerja Kecamatan Hatungun dengan target sampai dengan Tahun 2024 -2026 sebelum dan sesudah Perubahan disajikan berikut ini :

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN HATUNGUN

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target				
				Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022 TRI III	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	Survey tingkat kepuasan pelayanan	87,59	87,92	88	88,05	88,10	88,15	88,15
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	%	Jumlah Layanan masyarakat dengan indeks minimal B dibagi Jumlah Layanan yang masuk dikali 100 %	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	%	Jumlah Rekomendasi yang diselesaikan dibagi Jumlah Rekomendasi yang masuk dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan	%	Jumlah desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan dibagi Jumlah Desa yang ada di kecamatan dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	%	Jumlah desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik dibagi Jumlah Desa yang ada di kecamatan dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	72.50	0	72.59	72.68	72.79	72.89	72.89
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	Penilaian Inspektorat	24.57	0	24.58	24.59	24.61	24.63	24.63
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	Penilaian Inspektorat	19.06	0	19.10	19.14	19.18	19.20	19.20
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	Penilaian Inspektorat	10.34	0	10.36	10.38	10.41	10.45	10.45
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	Penilaian Inspektorat	18.53	0	18.55	18.57	18.59	18.61	18.61

PERUBAHAN										
Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal		Target				
				Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022 TRI III	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	Survey tingkat kepuasan pelayanan	87,59	87,92	88	88,05	88,10	88,15	88,15
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	%	(Jumlah layanan dengan IKM minimal B)/(Jumlah layanan di kecamatan) x100%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan) / (Jumlah desa se kecamatan) x100%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan) / (Jumlah desa se kecamatan) x100%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	%	(Jumlah desa dengan administrasi kependudukan yang baik) / (Jumlah desa se kecamatan) x100%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	72,50	0	72,59	72,68	72,79	72,89	72,89
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	Penilaian Inspektorat	24,57	0	24,58	24,59	24,61	24,63	24,63
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	Penilaian Inspektorat	19,06	0	19,10	19,14	19,18	19,20	19,20
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	Penilaian Inspektorat	10,34	0	10,36	10,38	10,41	10,45	10,45

	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	Penilaian Inspektorat	18,53	0	18,55	18,57	18,59	18,61	18,61
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)	0.00	0	42,6	44,6	45	48	48
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	(Jumlah ASN dengan capaian kinerja >90%)/(Jumlah ASN se kecamatan) x100%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Bidang Urusan Kecamatan Hatungun

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan															
Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Kecamatan															
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	136.000.000	100	145.000.000	100	154.000.000	100	435.000.000	CAMAT	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan Hatungun (Dengan Satuan:%)	100	100	128.000.000	100	135.000.000	100	142.000.000	100	405.000.000	KASI PEMBANGUNAN	
				Persentase laporan pada Seksi Pembangunan Kec. Hatungun (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEMBANGUNAN	
				Persentase Pelayanan Administrasi Kegiatan Keagamaan pada Seksi Kesejahteraan Rakyat Kec. Hatungun yang ditindaklanjuti. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI KESRA	
				Persentase keluhan/pengaduan masyarakat pada seksi Kesejahteraan Rakyat Kec. Hatungun yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI KESRA	
				Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat di Kec. Hatungun yang disalurkan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI KESRA	
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	8	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMBANGUNAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEMBANGUNAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	120.000.000	2	125.000.000	2	130.000.000	2	375.000.000	KASI KESRA	,Kecamatan Hatungun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha yang dikeluarkan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	30.000.000	KASI PEREKONOMIAN	
				Persentase keluhan/pengaduan masyarakat Hatungun pada seksi perekonomian yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEREKONOMIAN	
				Persentase laporan pada Seksi Perekonomian Kec. Hatungun (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEREKONOMIAN	
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEREKONOMIAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEREKONOMIAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	30.000.000	CAMAT	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan pada Seksi Trantib Kec. Hatungun (Dengan Satuan:%)	100	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	30.000.000	KASI TRANTIB	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	39.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	135.000.000	CAMAT	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat Hatungun pada Seksi Trantib yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	39.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	135.000.000	KASI TRANTIB	
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	0	300	35.000.000	300	40.000.000	300	45.000.000	300	120.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Dengan Satuan:Orang)	0	60	4.000.000	60	5.000.000	60	6.000.000	60	15.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa															
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	135.000.000	CAMAT	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Kependudukan Desa/Kelurahan di Kecamatan Hatungun (Dengan Satuan:Laporan)	96	96	40.000.000	96	45.000.000	96	50.000.000	96	135.000.000	KASI PEMERINTAHAN	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	135.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	53.000.000	100	65.000.000	100	77.000.000	100	195.000.000	CAMAT	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) (Dengan Satuan:Dokumen)	32	32	53.000.000	32	65.000.000	32	77.000.000	32	195.000.000	KASI PEMERINTAHAN	
				Jumlah dokumen terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa se-Kecamatan Hatungun (Dengan Satuan:Dokumen)	56	56		56		56		56		KASI PEMERINTAHAN	
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	16	16	4.000.000	16	5.000.000	16	6.000.000	16	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	16	16	4.000.000	16	5.000.000	16	6.000.000	16	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Hatungun
		7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	90.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah															
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)															
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Sekretariat . (Dengan Satuan:%)	100	100	3.253.522.157	100	3.607.769.595	100	3.965.546.554	100	10.826.838.306	SEKRETARIS KECAMATAN	
				Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN	
				Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu. (Dengan Satuan:%)	100	100	21.000.000	100	28.000.000	100	35.000.000	100	84.000.000	KASUBAG RENKEU	
				Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
				Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	13	10	15.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	60.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti. (Dengan Satuan:%)	100	100	1.940.522.157	100	2.149.769.595	100	2.337.546.554	100	6.427.838.306	KASUBAG RENKEU	
				Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
				Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang / bulan)	13	13	1.933.022.157	13	2.140.769.595	13	2.327.046.554	13	6.400.838.306	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	40	2.500.000	40	3.000.000	40	3.500.000	40	9.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	9.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	9.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	61,78	80	10.000.000	80	15.000.000	80	20.000.000	80	45.000.000	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	2.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	9.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	8	8.000.000	8	12.000.000	8	16.000.000	8	36.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat Kec. Hatungun (Dengan Satuan:Poin)	78	78	596.000.000	79	629.000.000	80	676.000.000	80	1.901.000.000	KASUBAG UMPEG	
				Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN (Dengan Satuan:%)	1	2		2		2		2		KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	51.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	32.000.000	1	34.000.000	1	36.000.000	1	102.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	55.000.000	1	56.000.000	1	57.000.000	1	168.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	42.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	5.000.000	12	8.000.000	12	10.000.000	12	23.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	475.000.000	12	500.000.000	12	540.000.000	12	1.515.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	61,78	80	205.000.000	80	230.000.000	80	255.000.000	80	690.000.000	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	14	5	125.000.000	7	130.000.000	10	135.000.000	10	390.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	3	50.000.000	6	60.000.000	8	70.000.000	8	180.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	2	30.000.000	3	40.000.000	5	50.000.000	5	120.000.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	61,78	80	95.000.000	80	106.000.000	80	117.000.000	80	318.000.000	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	18.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	105.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	195.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	61,78	80	386.000.000	80	450.000.000	80	525.000.000	80	1.361.000.000	KASUBAG UMPEG	
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	4	4	70.000.000	4	80.000.000	4	100.000.000	4	250.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	22	25	16.000.000	25	20.000.000	25	25.000.000	25	61.000.000	KASUBAG UMPEG	, Kecamatan Hatungun
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	1.050.000.000	KASUBAG UMPEG	, Kecamatan Hatungun
TOTAL:							3.529.522.157		3.917.769.595		4.309.546.554		14.908.197.375		

PERUBAHAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan															
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	136.000.000	100	145.000.000	100	154.000.000	100	435.000.000	CAMAT	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang terbitkan (Dengan Satuan:%)	0	100	128.000.000	100	135.000.000	100	142.000.000	100	405.000.000	KASI PEMBANGUNAN	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (seksi pembangunan) (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASI PEMBANGUNAN	
				Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI KESRA	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (seksi kesra) (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASI KESRA	
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	8	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMBANGUNAN	, Kecamatan Hatungun
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEMBANGUNAN	, Kecamatan Hatungun
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	120.000.000	2	125.000.000	2	130.000.000	2	375.000.000	KASI KESRA	, Kecamatan Hatungun

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Tingkat	Persentase Surat Rekomendasi Keterangan Usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (Dengan Satuan:%)	100	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	30.000.000	KASI PEREKONOMIAN	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASI PEREKONOMIAN	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEREKONOMIAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEREKONOMIAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	30.000.000	CAMAT	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi Trantibum yang diterbitkan Kec. Hatungun (Dengan Satuan:%)	0	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	30.000.000	KASI TRANTIB	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	100	100									
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	39.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	135.000.000	CAMAT	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Trantibum yang diterbitkan Kec. Hatungun (Dengan Satuan:%)	0	100	39.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	135.000.000	KASI TRANTIB	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASI TRANTIB	
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	300	300	35.000.000	300	40.000.000	300	45.000.000	300	120.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Dengan Satuan:Orang)	50	60	4.000.000	60	5.000.000	60	6.000.000	60	15.000.000	KASI TRANTIB	,Kecamatan Hatungun
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa														

	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik (Kecamatan Hatungun)(Dengan Satuan:%)	100	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	135.000.000	CAMAT	
			Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100			
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu (Dengan Satuan:Laporan)	100	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	135.000.000	KASI PEMERINTAHAN	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100			
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	135.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100	53.000.000	100	65.000.000	100	77.000.000	100	195.000.000	CAMAT	
			Persentase Desa dengan pengelolaan Aset yang sesuai ketentuan (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	87	80		80		80		80		CAMAT	
			Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (Kecamatan Hatungun) (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		CAMAT	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (Dengan Satuan:%)	100	100	53.000.000	100	65.000.000	100	77.000.000	100	195.000.000	KASI PEMERINTAHAN	
			Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi) (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEMERINTAHAN	
			Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEMERINTAHAN	
			Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik (Dengan Satuan:%)	87	80		80		80		80		KASI PEMERINTAHAN	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASI PEMERINTAHAN	
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa(Dengan Satuan:Dokumen)	16	16	4.000.000	16	5.000.000	16	6.000.000	16	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	16	16	4.000.000	16	5.000.000	16	6.000.000	16	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun

	7.01.06.2.01.07	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	4.000.000	8	5.000.000	8	6.000.000	8	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Hatungun
	7.01.06.2.01.15	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa diWilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	90.000.000	KASI PEMERINTAHAN	,Kecamatan Hatungun
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah														
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah														
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan. (Dengan Satuan:Poin)	88,05	88,10	3.253.522.157	88,15	3.607.769.595	88,20	3.965.546.554	88,25	10.826.838.306	CAMAT	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Score)	72,65	72,68		72,79		72,89		72,89		CAMAT	
			Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Poin)	46,5	44,4		45		48		48		CAMAT	
			Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	24,58	24,59		24,61		24,63		24,63		SEKRETARIS KECAMATAN	
			(Pengukuran Kinerja)	19,10	19,14		19,18		19,20		19,20			
			(Pelaporan Kinerja)	10,36	10,38		10,41		10,45		10,45			
			(Evaluasi Internal) (Dengan Satuan:Score)	18,55	18,57		18,59		18,61		18,61			
			Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN	
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:poin)	72,44	70,58		70,83		70,90		70,90		SEKRETARIS KECAMATAN	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti. (Dengan Satuan:%)	100	100	21.000.000	100	28.000.000	100	35.000.000	100	84.000.000	KASUBAG RENKEU	
			Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
			Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	Kecamatan Hatungun

7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	6.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	15	10	15.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	60.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dengan Satuan:%)	100	100	1.940.522.157	100	2.149.769.595	100	2.337.546.554	100	6.427.838.306	KASUBAG RENKEU	
		Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
		Persentase aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG RENKEU	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang / bulan)	13	13	1.933.022.157	13	2.140.769.595	13	2.327.046.554	13	6.400.838.306	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	40	2.500.000	40	3.000.000	40	3.500.000	40	9.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	9.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	9.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	69,31	80	10.000.000	80	15.000.000	80	20.000.000	80	45.000.000	KASUBAG UMPEG	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	2.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	9.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	8	8.000.000	8	12.000.000	8	16.000.000	8	36.000.000	KASUBAG RENKEU	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	7,69	7,69	596.000.000	7,69	629.000.000	7,69	676.000.000	7,69	1.901.000.000	KASUBAG UMPEG	
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG UMPEG	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	51.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	32.000.000	1	34.000.000	1	36.000.000	1	102.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Dengan Satuan:Paket)	1	1	55.000.000	1	56.000.000	1	57.000.000	1	168.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	42.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	5.000.000	12	8.000.000	12	10.000.000	12	23.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	475.000.000	12	500.000.000	12	540.000.000	12	1.515.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	69,31	80	205.000.000	80	230.000.000	80	255.000.000	80	690.000.000	KASUBAG UMPEG	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	91	5	125.000.000	7	130.000.000	10	135.000.000	10	390.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	3	50.000.000	6	60.000.000	8	70.000.000	8	180.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	2	30.000.000	3	40.000.000	5	50.000.000	5	120.000.000	KASUBAG UMPEG	Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	100	95.000.000	100	106.000.000	100	117.000.000	100	318.000.000	KASUBAG UMPEG	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	18.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	105.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	195.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	69,31	80	386.000.000	80	450.000.000	80	525.000.000	80	1.361.000.000	KASUBAG UMPEG	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Dengan Satuan:Unit)	4	4	70.000.000	4	80.000.000	4	100.000.000	4	250.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	22	25	16.000.000	25	20.000.000	25	25.000.000	25	61.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	1.050.000.000	KASUBAG UMPEG	,Kecamatan Hatungun
TOTAL:					3.529.522.157	3.917.769.595		4.309.546.554		14.908.197.375			

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin 2024 – 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- Perubahan Renstra Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin 2024 – 2026 juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin 2024 – 2026 dikendalikan oleh Camat Hatungun, serta diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika perubahan maka Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 sangat diharapkan.

- Pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin 2024 – 2026 dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik.
- Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan/atau perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Semoga Perubahan Renstra Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin 2024 – 2026 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, secara konsisten dalam rangka mendukung perencanaan dan pembangunan daerah.

Pj. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd.